

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adhami, 2000, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi Sutopo, Ariesto, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenata Media Group, Jakarta.

Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

R. Subekti, 1979, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T. Djaned, 1992, *Asas-Asas Hukum Adat*, Banda Aceh FH Unsyiah, Banda Aceh.

Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wiryono, 1977, Cetakan ke IX, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.

Prodjodikoro, Wiryono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Tanah Benda-Benda Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Lembaran Negara Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 120

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Kredit Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5914.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

C. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Internet

Nanang Sutanto, 2006, "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Bagi Notaris/PPAT Karena Produk Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 01/PID/B/2001/PN PWR Di Pengadilan Purworejo)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sri Widiyanti, 2008, "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Pada Kebenaran Materiil Akta Yang dibuatnya (Studi Kasus di Kabupaten Purworejo)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ika Isnania, 2011, "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus: Akta Jual Beli Tanah No. 170/Cempaka Putih, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1923K/PDT/2008)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

"Diduga Palsukan Dokumen Tanah Sayogo Dipolisikan", <http://www.tribun-maluku.com/2016/07/diduga-palsukan-dokumen-tanah-sayogo-dipolisikan.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

"Sidang Kasus Pemalsuan Akta Tanah, Pria Uzur Duduk Di Kursi Pesakitan", <https://www.jurnalasia.com/medan/sidang-kasus-pemalsuan-akte-tanah-pria-uzur-duduk-di-kursi-pesakitan-2/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016

"Notaris Buat Akta Tanpa Hadirnya Salah Satu Pihak, Bisa Dipidanakan", <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Notaris-Buat-Akte-tanpa-Hadirnya-Salah-Satu-Pihak,-bisa-Dipidanakan>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016